

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian terdahulu ternyata sudah banyak yang melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan bank menggunakan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) dan potensi *financial distress* pada perbankan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iswadi (2017) yang berjudul Analisa Kinerja Keuangan Prediksi Kebangkrutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menggunakan variabel BOPO, CAR, FDR, dan ROA. Hasil penelitian menyatakan hanya ada 1 bank yaitu BPRS Carana Kiat Andalas yang dalam kondisi sehat ada dua BPRS yang berpotensi bangkrut. Yang membedakan yaitu analisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMELS, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode RBBR. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kebangkrutan menggunakan *Z-Score* sedangkan penelitian saya menggunakan regresi logistik.
2. Penelitian oleh Nugroho (2012) yang berjudul Pengaruh CAMEL dalam Memprediksi Kebangkrutan Bank. Menggunakan variabel CAR, LDR, ROE, ROA, BOPO, NPL dan NIM dengan hasil multivariat yang menyatakan bahwa variabel LDR berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia pada tingkat $\alpha = 5\%$ walaupun terdapat tanda yang berbeda dengan perkiraan. Variabel CAR, NPL, BOPO, ROE dan NIM diprediksi tidak signifikan namun memiliki tanda yang sama. Variabel ROA tidak signifikan dan terdapat tanda yang berbeda dari

perkiraan. Tingkat keakuratan bank dalam memprediksi kebangkrutan di tahun 2009 mencapai 94,6%. Perbedaannya yaitu variabel penelitian sekarang tidak menggunakan ROE dan NIM, sedangkan persamaannya yaitu variabel CAR, BOPO, NPF dan ROA.

3. Penelitian oleh Kurniasari dan Ghazali (2013) berjudul Analisis Pengaruh Rasio CAMEL dalam Memprediksi *Financial Distress* Perbankan Indonesia. Dengan variabel CAR, ROA, ROE, NPL, BOPO, dan LDR menyimpulkan bahwa terdapat sampel 85 bank, terdiri dari bank tidak bermasalah sebesar 80 dan bank bermasalah sebesar 5. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NPL, CAR, ROE, dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas *financial distress* bank. BOPO dan LDR berpengaruh signifikan terhadap probabilitas *financial distress* bank. Perbedaannya yaitu variabel pada penelitian sekarang tidak menggunakan ROE. Selain itu, analisis tingkat kesehatan bank yang digunakan yaitu CAMEL sedangkan penelitian sekarang menggunakan RBBR. Persamaannya yaitu menggunakan analisis regresi logistik.
4. Penelitian oleh Pambudi dan Darmawan (2018) berjudul Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Periode 2014-2016). Menggunakan variabel NPL, GCG, ROA dan CAR dengan hasil penelitian pada faktor profil risiko dengan menggunakan rasio NPL terdapat 1 bank mendapat rata-rata predikat tidak baik. Pada faktor

GCG untuk mengukur kinerja BUS menunjukkan nilai bahwa tidak terdapat BUS yang mendapat rata-rata predikat sangat baik pada GCG selama periode 2014 hingga 2016. Pada faktor Rentabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA terdapat 1 BUS dengan nilai rasio ROA yang mendapat rata-rata predikat tidak baik. Pada faktor Permodalan yang diukur menggunakan rasio CAR secara keseluruhan Bank Umum Syariah yang diteliti mendapat rata-rata predikat sangat baik selama periode 2014 hingga 2016. Perbedaannya yaitu sampel penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah sedangkan penelitian saat ini di BPRS yang digunakan berbeda pada penelitian sekarang memasukkan rasio NPF, FDR dan BOPO.

5. Penelitian oleh Suhartono dkk. (2017) berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RBBR (Studi Pada Bank Milik Pemerintah Pusat Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015). Menggunakan variabel NPL, IRR, CAR, ROA dan LDR, dengan hasil penelitian pada faktor *risk profile* menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat memiliki rata-rata NPL < 5%. Rasio ROA dan NIM memiliki rata-rata rentabilitas bank sangat memadai dalam permodalan bank. Hasil rasio CAR menyatakan keseluruhan bank berpredikat sangat sehat sehingga bank mampu memenuhi kewajiban penyediaan modal. Pembedaannya yaitu sampel penelitian terdahulu di bank milik pemerintah pusat sedangkan penelitian saat ini di BPRS. Rasio keuangan yang digunakan juga berbeda yang membedakan adalah rasio NPL, IRR, dan LDR sedangkan penelitian sekarang menggunakan NPF, FDR dan BOPO.

6. Penelitian oleh Yastynda (2016) berjudul *Prediksi Financial Distress Pada Bank Umum Syariah Dengan Analisis Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital*. Dengan variabel FDR, GCG, NIM, CAR, dan ROA yang menyimpulkan bahwa rasio FDR, ROA, GCG dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas *financial distress* pada BUS, sedangkan rasio NIM berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas *financial distress* pada BUS. Perbedaannya yaitu sampel penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah sedangkan penelitian saat ini di BPRS. Variabel yang membedakan yaitu pada penelitian sekarang tidak memasukkan rasio NIM dan GCG.
7. Penelitian oleh Setiawan dan Amboningtyas (2018) berjudul *Financial Ratio Analysis For Predicting Financial Distress Conditions (Study On Telecommunication Companies Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2010-2016)*. Dengan variabel Rasio Likuiditas, Rasio *Leverage*, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas yang menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05. Rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas, rasio profitabilitas secara simultan memiliki nilai f hitung lebih besar dari f tabel yaitu $7.074 > 2.69$ dengan signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ berarti bahwa rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas, rasio profitabilitas secara simultan mempunyai pengaruh dan signifikan. Perbedaannya yaitu sampel penelitian terdahulu pada perusahaan telekomunikasi sedangkan penelitian

saat ini di BPRS. Variabel yang digunakan berbeda yaitu Rasio Likuiditas, Rasio *Leverage*, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas.

8. Penelitian oleh Ihsan dan Kartika (2015) berjudul Potensi Kebangkrutan pada Sektor Perbankan Syariah untuk Menghadapi Pertumbuhan Lingkungan Bisnis. Dengan menggunakan variabel NPF, LR, ROA, NCOM, dan CAR, dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan BUS menggunakan metode RGEC masuk ke dalam kategori sehat selama tahun 2010-2014. Model *Altman Z-Score* menunjukkan BUS berada dalam keadaan *safe zone* (tidak bangkrut) selama 2010-2014. Perbedaannya yaitu sampel penelitian sebelumnya di BUS penelitian sekarang di BPRS. Metode analisis *financial distress* menggunakan *Altman's Z-Score* sedangkan penelitian sekarang menggunakan regresi logistik. Variabel yang membedakan yaitu LR dan NCOM.
9. Penelitian oleh Mamu dkk. (2016) berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Tbk Dengan Menggunakan Metode RGEC. Dengan variabel CAR, NPA, ROA, ROE, NIM, FDR, NPL, LR, IRR dan DR. Yang menyimpulkan Tingkat Kesehatan BNI Syariah tahun 2012- 2014 sehat sehingga bank sangat mampu menghadapi pengaruh negatif signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain yang tercermin dari faktor penilaian yaitu *risk profile*, rentabilitas, dan capital secara umum baik. Kesimpulannya PK-2, yang mencerminkan bank dalam kondisi sehat. Perbedaannya yaitu tidak menggunakan variabel NPA, LR, IRR, ROE dan DR. Sampel yang digunakan di BNI Syariah.

10. Penelitian oleh Rahmaniah dan Wibowo (2015) berjudul Analisis Potensi Terjadinya *Financial Distress* Pada Bank Umum Syariah (BUS). Dengan variabel CAR, BOPO, NOM, ROA, ROE, FDR, dan NPF yang menyimpulkan bahwa ketiga BUS mengalami penurunan *earning* yang diukur dengan rasio ROE dan ROA dan FDR sebagai alat ukur likuiditas, namun penurunan kinerja BUS tidak berpengaruh terhadap tingginya potensi *financial distress*. Perbedaannya yaitu obyek penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian sekarang di BPRS. Variabel yang membedakan yaitu tidak ada rasio NOM dan ROE.

B. Landasan Teori

1. *Pecking Order Theory*

Menurut Myers (1984) dalam Yastynda (2016), *Pecking Order Theory* yaitu “Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi justru memiliki hutang rendah, hal ini dikarenakan suatu perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi maka memiliki sumber dana dari dalam yang melimpah”. Di dalam *pecking order theory* memiliki sumber pendanaan yang terbagi menjadi dua yaitu pendanaan yang diperoleh dari luar perusahaan dan pendanaan yang diperoleh dari dalam perusahaan. Secara umum bank lebih memilih menggunakan pendanaan dari dalam seperti modal pribadi dibandingkan pendaan dari luar. Ketika sumber dana dari luar memang diperlukan, maka bank lebih memilih pendanaan yang aman hingga paling berisiko.

Teori ini juga mengatakan bahwa turunnya nilai suatu bank maka disebabkan oleh tingginya rasio hutang (Weston dan Copeland, 1992) dalam (Yastynda, 2016). Tingginya rasio hutang maka berakibat pada semakin besarnya tingkat risiko yang dihadapi. Suatu bank yang awalnya masuk pada kategori non *financial distress* dapat berubah menjadi *financial distress*. Jika kondisi ini secara terus menerus dialami maka kondisi bank semakin buruk dan hal tersebut menyebabkan potensi kebangkrutan yang akan dihadapi oleh bank.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatan usaha dan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah (BI, 2018). Bank Syariah terbagi menjadi 2 jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Yang membedakan BPRS dengan BUS adalah BPRS tidak memberikan layanan jasa pembayaran sedangkan BUS menyediakan layanan jasa dalam lalulintas pembayaran (OJK, 2018). Perbedaan lainnya yaitu BPRS lebih memfokuskan untuk melayani Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) namun operasionalnya tetap berdasarkan prinsip syariah.

b. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tujuan dari didirikannya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sebagai berikut (Sudarsono, 2012) :

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat yang memiliki golongan ekonomi lemah yang berada di pedesaan dalam sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah. Di sini yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat di pedesaan yang beragama Islam.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi sumber permodalan bagi masyarakat untuk menambah lapangan pekerjaan di pedesaan dan kecamatan agar mengurangi arus urbanisasi masyarakat.
- 3) Membina *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi seperti membuat UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan per kapita agar masyarakat di pedesaan memiliki kualitas hidup yang baik.

3. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Kasmir (2012) sebuah laporan yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini bahkan pada periode tertentu. Laporan perusahaan terkini biasanya menyajikan keadaan keuangan perusahaan pada tetentu melalui neraca dan periode tertentu untuk laporan laba-rugi.

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut IAI (2007), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan secara

lengkap yang terdiri dari laporan keuangan hasil kegiatan komersial atau sosial. Dari kegiatan komersial terdapat beberapa laporan antara lain: laporan ekuitas, laporan laba rugi dan laporan neraca yang disajikan dengan berbagai macam cara misalnya seperti laporan arus kas, catatan serta laporan lainnya. Sedangkan laporan keuangan sosial biasanya berupa laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

b. **Komponen-Komponen Laporan Keuangan**

Sebuah laporan keuangan memiliki komponen-komponen keuangan serta maksud dan tujuannya tersendiri, komponen ini dibagi menjadi 3 laporan antara lain (Kasmir, 2014):

1) **Neraca**

Neraca adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan jumlah kewajiban (utang), aktiva (harta), dan modal perusahaan (ekuitas) pada periode tertentu. Laporan neraca biasanya dibuat secara periodik yaitu setahun sekali, namun manajemen atau pemilik perusahaan dapat meminta laporan neraca kapan saja untuk mengetahui secara pasti berapakan jumlah hutang, aktiva dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu.

2) **Laporan laba rugi**

Laporan laba rugi merupakan laporan yang dibuat untuk menunjukkan keadaan usaha suatu perusahaan pada waktu tertentu. Maka laporan laba rugi harus dibuat rutin setiap periode agar dapat

mengetahui berapa jumlah pendapatan (penjualan, berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk produksi) sehingga pemilik usaha atau manajemen dapat mengetahui apakah perusahaan dalam keadaan rugi atau laba.

3) Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan. Arus kas biasanya berupa pinjaman dari bank lain dan pendapatan, sedangkan arus kas keluar berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan. Laporan arus kas ini biasanya dibuat pada periode tertentu saja.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Sebuah laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan baik pada periode tertentu atau pada saat dibutuhkan saat tertentu. Maka laporan keuangan ini berguna untuk pihak luar dan pihak dalam perusahaan yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Di sini terdapat beberapa tujuan dari pembuatan laporan keuangan antara lain (Kasmir, 2014):

- 1) Menggambarkan informasi mengenai jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini.
- 2) Memberi informasi mengenai jenis dan jumlah modal dan kewajiban yang dimiliki perusahaan.
- 3) Menunjukkan jumlah perolehan pendapatan pada suatu periode.

- 4) Menunjukkan kinerja perusahaan pada periode tertentu.
- 5) Menunjukkan informasi mengenai perubahan aktiva, perubahan modal, dan pasiva perusahaan.
- 6) Meberikan informasi keuangan lainnya, dll.

4. Tingkat Kesehatan Bank

a. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank merupakan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang telah berlaku. Penilaian kesehatan bank bertujuan mengetahui kondisi suatu bank apakah sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Penilaian ini sangat penting karena bank sebagai pengelola dana masyarakat sehingga bank wajib menjaga kepercayaan nasabah, sehingga jika nasabah mau mengambil dananya sewaktu-waktu maka bank harus sanggup mengembalikannya. Apabila bank yang sulit akan memenuhi kewajibannya jika bank tersebut sakit maka harus segera disehatkan demi menjaga kepercayaan nasabah (Kasmir, 2002).

Tabel 2.1 Perkembangan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Undang-Undang	Perihal
SE BI No.30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998	Tentang Perubahan Surat KepDir BI No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 mengenai Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dengan faktor CAMEL yang terdiri dari: <i>Capital, Asset Quality, Management, Earnings</i> , dan <i>Liquidity</i> .
PBI No. 6/10/PBI/2004 dan SE BI No.6/ 23 /DPNP tanggal 31 Mei 2004	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan metode CAMELS, dengan ditambah faktor <i>Sensitivity to Market Risk</i>
PBI No.13/1PBI/2011 dan SEBI No.13/24/DPNP/2011 tanggal 5 Januari 2011	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i>
POJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 1 Juli 2014 dan SE OJK No.10/SEOJK.03/2014	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan metode RBBR (<i>Risk Based Bank Rating</i>)

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (2018)

1) Metode RBBR

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyatakan bahwa di dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah RBBR (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individu atau konsolidasi (OJK, 2018).

Pada metode RBBR (*Risk Based Bank Rating*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank terdapat cakupan penilaian yang terdiri dari 4 faktor yaitu (OJK, 2018):

- a. Profil Risiko (*risk profile*)
- b. GCG (*Good Corporate Governance*)

c. Rentabilitas (*earnings*)

d. Permodalan (*capital*)

5. Analisis Profil Risiko (*Risk Profile*)

Berdasarkan pasal 1 POJK No.8/POJK.03/2014 penilaian terhadap faktor profil risiko inheren dan kualitas penilaian manajemen resiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap beberapa resiko antara lain:

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit yaitu risiko yang datang akibat gagalnya pihak debitur untuk membayar kewajibannya kepada bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur risiko kredit yaitu menggunakan NPF (*Non Performing Financing*). Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank. Kualitas pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan menjadi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, dan macet.

Semakin tinggi rasio NPF suatu bank maka semakin buruk kualitas kredit bank dalam mengelola pembiayaan sehingga menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka semakin mudah terjadi *financial distress* (Hariyani, 2010) dalam (Khadapi, 2017). Dalam SEBI Nomor 15/35/DPAU/2013 mengatur standar NPF yaitu sebesar 5%.

Dengan formulasi sebagai berikut:

$$(NPF) = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEBI No.13/24/DPNP Tahun 2011

b. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo yang berasal dari aset likuiditas yang berkualitas tinggi yang bisa diagunkan tanpa mengganggu aktivitas serta keuangan bank (Al-Arif dan Rahmawati, 2018). Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio yang digunakan bank sebagai alat ukur kemampuan bank dalam memenuhi pembiayaan dengan menggunakan total asset bank (Dendawijaya, 2003) dalam (Wahyudi, 2017).

Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin rendah pula tingkat likuiditas bank. Namun, dipihak lain semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan diharapkan bank memperoleh return yang tinggi (Wangsawidjaja, 2012). Standar rasio FDR menurut Bank Indonesia pada kisaran 75% hingga 100% dengan formulasi seperti berikut (BI,2018):

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$FDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < FDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < FDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < FDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$FDR > 120\%$

Sumber : SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

6. Analisis Good Corporate Governance (GCG)

Dalam melakukan penilaian faktor GCG, peneliti akan menggunakan hasil penilaian *self assessment* dari bank. Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola perusahaan/bank dengan menerapkan prinsip-prinsip *transparency* (keterbukaan), *responsibility* (pertanggung jawaban), *accountability* (akuntabilitas), *fairness* (kewajaran), dan *independency* (independensi) (BI, 2018).

Prinsip dasar GCG dengan transparansi merupakan keterbukaan informasi mengenai proses dalam pengambilan keputusan atau pengungkapan informasi yang relevan tentang perusahaan. Prinsip akuntabilitas merupakan prasyarat yang sangat diperlukan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan, akuntabilitas sendiri mengandung unsur kejelasan suatu organisasi dan cara mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Prinsip responsibilitas merupakan unsur kepatuhan terhadap peraturan baik undang-undang dan ketentuan yang dibuat oleh bank serta tanggung jawab kepada masyarakat. Prinsip independensi merupakan pengelolaan bank secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak

manapun. Prinsip *fairness* merupakan perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama sesuai dengan porsinya, dalam melaksanakan kegiatan bank harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dari para pihak yang bersangkutan (Danupranata, 2018).

7. Analisis Faktor Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan melihat kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan mengukur tingkat profitabilitas bank adalah ROA (*Return On Asset*) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

a. ROA (*Return On Assets*)

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin tinggi tingkat profitabilitas bank maka bank akan terhindar dari kondisi kurang baik begitu sebaliknya jika tingkat profitabilitas atau nilai rasio rendah maka bank akan mengalami kondisi kurang baik / *financial distress* (Almilia, 2005). Berikut ini rumus menghitung ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Menurut PBI standar minimum ketepatan ROA yaitu (>1.5%). Berikut merupakan kriteria penilaian peringkat terhadap ROA menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Ratio On Assets* (ROA)

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	ROA > 1,5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011

b. Rasio BOPO

BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) digunakan melihat besarnya kemampuan manajemen suatu bank dalam mengatur biaya operasional bank. Semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas bank meningkat.

Mengingat kegiatan utama bank sebagai lembaga *intermediary* bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga biaya dan penempatan operasionalnya didominasi dengan biaya bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2009) dalam (Wahyudi, 2017). Menurut standar ketentuan BI rasio BOPO memiliki tingkat efisiensi yang baik sebesar < 96%. Dengan formulasi seperti berikut:

$$(\text{BOPO}) = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	BOPO ≤ 94%

2	Sehat	$94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$
3	Cukup Sehat	$95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$
4	Kurang Sehat	$96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$
5	Tidak Sehat	$\text{BOPO} > 97\%$

Sumber: SEBI No.13/24/DPNP Tahun 2011

8. Analisis Faktor Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Rasio keuangan yang tepat untuk mengukur kecukupan modal dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam permodalan sebagai penutup kemungkinan adanya kerugian dalam pembiayaan atau perdagangan surat berharga (Umam, 2013).

Dalam penilaian kecukupan permodalan maka bank harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko Bank. Tingginya risiko bank maka semakin besar modal (CAR) yang harus dicadangkan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Berikut ini formulasi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Menurut PBI N0.3/21/PBI/2001 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (BI, 2018). Berikut

merupakan kriteria penilaian peringkat terhadap CAR menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR < 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEBI No.6/23/DPN Tahun 2004

9. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah sudah diatur dalam POJK No.8/POJK.03/2014 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1)
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2)
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3)
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4)
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5)

Berdasarkan PK (Peringkat Komposit) di atas maka dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah seperti berikut:

Tabel 2.7 Matriks Kriteria Penilaian Peringkat Komposit BUS

Peringkat	Penjelasan Kriteria Penilaian Komposit
Peringkat Komponen-1 (PK-1)	Mencerminkan tentang kondisi Bank secara umum sangat sehat sehingga dapat dinilai sangat mampu dalam menghadapi adanya pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komponen-2 (PK-2)	Mencerminkan tentang kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dapat dinilai mampu dalam menghadapi adanya pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komponen-3 (PK-3)	Mencerminkan tentang kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dapat dinilai cukup mampu dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komponen-4 (PK-4)	Mencerminkan tentang kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dapat dinilai kurang mampu dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komponen-5 (PK-5)	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dapat dinilai tidak mampu dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sumber: POJK No.8/POJK.03/2014 (2018)

Berdasarkan masing-masing komponen yang sudah dianalisis menggunakan perhitungan rasio keuangan berikutnya diperoleh hasil yang didapatkan sebagai analisis tingkat kesehatan bank pada peringkat komposit tertentu. Nilai komposit untuk masing-masing komponen yang menempati peringkat komposit memiliki nilai seperti berikut:

- a. Peringkat 1 = setiap ceklist dikalikan 5
- b. Peringkat 2 = setiap ceklist dikalikan 4
- c. Peringkat 3 = setiap ceklist dikalikan 3
- d. Peringkat 4 = setiap ceklist dikalikan 2
- e. Peringkat 5 = setiap ceklist dikalikan 1

Dari hasil perkalian ceklist tadi akan didapatkan nilai komposit yang kemudian ditentukan bobotnya dengan mempresentasikan. Berikut ini

mengenai tabel presentase sebagai penentu tingkat komposit keseluruhan komponen yaitu:

Tabel 2.8 Matriks Kriteria Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RBBR

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86% - 100%	Peringkat Komposit 1	Sangat Sehat
71% - 85%	Peringkat Komposit 2	Sehat
61% - 70%	Peringkat Komposit 3	Cukup Sehat
41% - 60%	Peringkat Komposit 4	Kurang sehat
≤ 40%	Peringkat Komposit 5	Tidak Sehat

Sumber: POJK No.8/POJK.03/2014 (2018)

10. Financial Distress

Financial distress merupakan suatu tahapan kondisi perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan juga disebut likuidasi perusahaan/ penutupan perusahaan. Kebangkrutan diartikan sebagai sebuah kegagalan keuangan dan kegagalan ekonomi. Plat dan Plat (2002) mengungkapkan *financial distress* merupakan tahapan penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan bank atau likuidasi. *Financial distress* adalah suatu kondisi dimana perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban lancar atau jangka pendeknya karena mengalami kesulitan arus kas (seperti utang dagang atau beban bunga) dan perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan (Khadapi, 2017).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *financial distress* adalah situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar dan terpaksa perusahaan melakukan perbaikan. Sedangkan kebangkrutan itu ditandai dengan *financial distress*

yaitu suatu perusahaan lemah menghasilkan laba sehingga menyebabkan defisit, dan jika kesulitan perusahaan ini tidak dapat disehatkan maka akan terjadi likuidasi/ penutupan bank.

Faktor yang menyebabkan kondisi *financial distress* berupa pengaruh internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan meliputi perusahaan mengalami rugi selama beberapa periode dari kegiatan operasional, besarnya jumlah hutang serta kesulitan arus kas. Faktor eksternal meliputi suku bunga pinjaman meningkat, mengakibatkan beban bunga yang ditanggung perusahaan juga bertambah naik, lain dari itu ada pula meningkatnya biaya-biaya tenaga kerja yang menyebabkan besarnya biaya operasional suatu perusahaan juga mengalami kenaikan.

Salah satu penyebab terjadinya *financial distress* yaitu buruknya pengelolaan manajemen bank. Namun karena banyaknya kondisi internal dan eksternal terdapat hal lain yang menyebabkan terjadinya *financial distress*. Ditinjau dari segi keuangan *financial distress* dapat ditimbulkan oleh 3 hal yaitu (Rodoni dan Ali, 2014:189):

- a. Ketidalcukupan modal atau kekurangan modal
- b. Besarnya beban hutang
- c. Mengalami kerugian

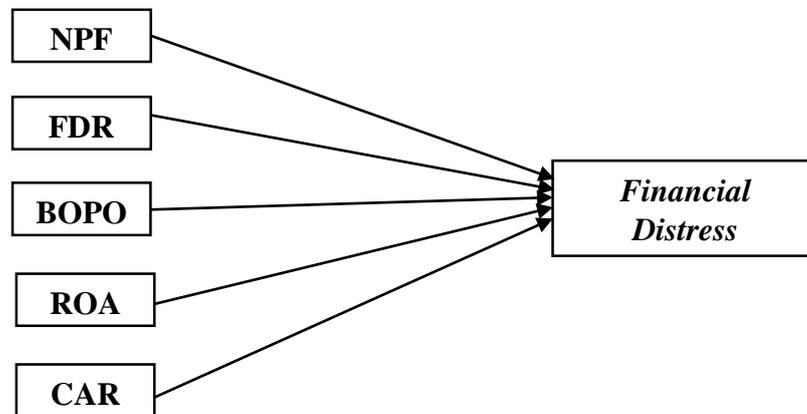
Rondoni dan Ali mengungkapkan aspek yang harus dijaga keseimbangannya agar tidak terjadi *financial distress* yaitu (Rodoni dan Ali, 2014:190):

- a. Kemampuan memperoleh laba

- b. Tingkat hutang dalam struktur permodalan
- c. Likuiditas

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan literatur, tinjauan pustaka, dan penelitian sebelumnya maka peneliti memiliki gambaran kerangka dan pola pemikiran dalam penelitian seperti berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, landasan teori, serta kerangka teori maka dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan hipotesis mengenai keterikatan setiap variabel yang mempengaruhi adanya potensi *financial distress* sebagai berikut:

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017 (X_1)

Rasio NPF (*Non Performing Financing*) menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengatur pembiayaan bermasalah

yang diberikan agar semakin kecil. Semakin tinggi nilai NPF suatu bank maka semakin buruk manajemen bank dalam mengelola pembiayaan sehingga bank mudah mengalami *financial distress*.

Dalam SEBI Nomor 15/35/DPAU/2013 mengatur standar NPF yaitu sebesar 5%. Menurut Sholikati (2018) yang menyatakan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya *financial distress* BUS di Indonesia. Berbeda dengan Kharisma (2018) yang menyatakan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*. Dari pemaparan di atas maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut:

H_1 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara NPF terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017

2. Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017 (X_2)

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mengukur kemampuan bank dalam mengembalikan penarikan dana yang dilakukan deposan dengan hasil pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditasnya. Berdasarkan ketentuan BI batas aman dari FDR suatu berkisar 75%-100% (Dendawijaya, 2009). Semakin tinggi atau semakin rendahnya nilai FDR di luar batasan ketentuan BI maka dapat menyebabkan bank berpotensi *financial distress*.

Menurut Khadapi (2017) dan Sholikati (2018) menyatakan bahwa FDR berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap *financial distress* Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil yang berbeda didapat dari penelitian Rahmania dan Hermanto (2014) yang mengatakan bahwasannya FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas *financial distress*. Dari pemaparan di atas maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut:

H_2 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara FDR terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017

3. Pengaruh BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017 (X_4)

BOPO digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank (Martono, 2010). Semakin rendah nilai rasio BOPO, maka semakin efisien dalam mengeluarkan biaya operasional sehingga pendapatan yang diperoleh bank semakin meningkat sehingga menjauhkan bank dari adanya potensi *financial distress*.

Menurut Kharisma (2018) dan Khadapi (2017), yang mengatakan bahwasannya BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*. Berbeda dengan Rahmania dan Hermanto (2014) yang mengatakan bahwasanya BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*. Dari pemaparan di atas maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut:

H_3 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara BOPO terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017

4. Pengaruh ROA (*Return on Assets*) terhadap *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017 (X_4)

ROA (*Return on Assets*) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset (Hery, 2015). Semakin tinggi nilai rasio ROA maka menunjukkan bahwa manajemen bank berhasil dalam mengolah asset yang dimiliki sehingga dapat menciptakan laba yang besar, hal ini dapat menjauhkan bank dari adanya potensi *financial distress*.

Menurut Khadapi (2017) dan Kharisma (2018) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap *financial distress*. Berbeda dengan hasil dari Theodorus dan Gede (2018) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan dalam memprediksi probabilitas *financial distress*. Dari pemaparan di atas maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut:

H_4 = Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara ROA terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017

5. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017 (X_5)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai alat ukur besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menanggung aktiva

tertimbang menurut risiko. Tingginya rasio CAR mengindikasikan semakin tinggi kekuatan bank dalam menanggung risiko yang dihadapi. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risikonya (Rivai, 2013:473). Semakin rendah nilai CAR maka dapat menyebabkan potensi *financial distress* pada bank.

Menurut Khadapi (2017) menyatakan bahwa CAR berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap *financial distress*. Penelitian Wicaksana (2011) yang mengatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Berbeda dengan Kharisma (2018) menyatakan bahwa CAR memiliki hasil positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Dari pemaparan di atas maka peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut:

H_5 = Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara CAR terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY tahun 2014-2017.